

Jl. Pramuka No. 5 Tuban

Telepon : (0356) 8833 708

Surel : set.tuban@bawaslu.go.id

Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 202.A/PM.00.02/K.JI-28/09/2024

08 September 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban

di-

Tempat

A. Dasar Hukum:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022;
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023;
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024;
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024;
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024;
- 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024;
- 9) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- 10) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- 11) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 12) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
- 13) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- 14) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 15) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 16) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 17) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 18) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 22A Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020, Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. Bahwa sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada sub Tahapan Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen Syarat Calon Pengganti oleh KPU Kabupaten Tuban, maka Bawaslu Kabupaten Tuban mengimbau kepada KPU Kabupaten Tuban untuk:

1. Melakukan penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon dengan tepat dan cermat, sebagaimana dalam jadwal Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024, dilaksanakan pada tanggal 6 september sampai dengan 14 september 2024;

2. Memperhatikan pasal 118 sampai dengan pasal 119 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 dalam melakukan penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon;
3. Bahwa KPU Kabupaten Tuban apabila terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon, KPU Kabupaten Tuban melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang dan menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara klarifikasi sebagaimana Pasal 113 PKPU 8/2024;
4. Berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Tuban apabila KPU Kabupaten Tuban melakukan Klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang;
5. Tidak melakukan tindakan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam proses penelitian perbaikan persyaratan administrasi;
6. KPU Kabupaten Tuban agar berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Tuban terhadap potensi - potensi kerawanan terjadinya pelanggaran Pemilihan termasuk namun tidak terbatas pada :
 - a. Pelanggaran administrasi dikarenakan tidak melaksanakan verifikasi sesuai dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme;
 - b. Pelanggaran Tindak Pidana Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilihan dan/atau ketentuan pidana lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pemilihan yang berimplikasi pada proses pengajuan pendaftaran peserta pemilihan, dan peraturan KPU pada seluruh tahapan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.dalam Pemilihan tahun 2024;
 - c. Pelanggaran kode etik, Potensi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada seluruh tahapan Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Tahun 2024;
 - d. Pelanggaran lainnya, Potensi penggunaan fasilitas negara yang dilakukan oleh Aparat Sipil Negara dalam Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati;
 - e. Pelanggaran sengketa Pemilihan, KPU Kabupaten mengeluarkan Surat Keputusan, Berita Acara atau tanda pengembalian yang menimbulkan akibat hukum berupa kerugian secara langsung bagi pasangan calon akibat dikeluarkannya Surat Keputusan, Berita Acara atau tanda pengembalian tersebut;
7. Memberikan akses kepada Bawaslu Kabupaten Tuban untuk melakukan pengawasan sub Tahapan Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;

8. KPU Kabupaten Tuban melaksanakan setiap tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundangan – undangan yang berlaku;

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua



M. Arifin, M.Sos.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip